

'Civil Society', Patriarki, dan Hegemoni

NUR IMAN SUBONO

Abstract

This article will discuss about civil society in relation with the problem of hegemony and patriarchy. What is intended to be explored here is how through hegemony a consensus, supported by members of the society on basis of the preexisting social-political order, can be achieved, and how this consensus is further reinforced by patriarchy, which has been deeply rooted in our society, especially in women, which often in many cases then become underprivileged. The problem which lies here, and thus become the main focus of this article, is that this system has become so strong and deeply rooted that it operates so subtly it became so natural and even considered as something given or taken for granted. The question which shall be explored at the end of this article therefore is whether there is still a room for society, especially for women, to stand up for a fight, or at least to negotiate or compromise so that they can still define their own interests and goals in a relatively independent or autonomous way.

"Aku mengidamkan agar kaum perempuan belajar menilai apa pun dengan cara pandang mereka sendiri dan bukan melalui mata laki-laki"

(Annie Leclerc, 1974)

PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, pembicaraan mengenai '*civil society*' termasuk salah satu yang mengemuka di samping soal reformasi, hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Rasa-rasanya tidak lengkap jika suatu pembicaraan dalam seminar atau kertas kerja dalam makalah tanpa menyertakan kata '*civil society*' di dalamnya. Meskipun demikian, pembicaraan mengenai kata yang satu ini akan menghadirkan sebuah persoalan tersendiri jika sudah dikaitkan dengan masalah definisi, batasan-batasan atau pengertian, sejarah, serta tokoh-tokoh yang bicara mengenai '*civil society*'¹. Belum lagi kalau kita bicara soal alih bahasa yang saat ini ada beberapa antara lain seperti masyarakat sipil, masyarakat warga/kewargaan, dan masyarakat madani.²

Tulisan ini sendiri tidak akan masuk dalam perdebatan tersebut, tapi yang ingin

ditampilkan di sini adalah pembicaraan mengenai *civil society* yang dikaitkan dengan persoalan hegemoni dan patriarki. Jika konsep pertama umumnya akan merujuk pada tokoh Antonio Gramsci yang memang dikenal karena konsep hegemoni tersebut, sementara konsep yang belakangan biasanya ditampilkan oleh kalangan feminis dalam hubungannya dengan subordinasi dan marjinalisasi perempuan. Apa yang hendak ditunjukkan di sini adalah, bagaimana melalui hegemoni dicapai suatu konsensus yang didukung kelompok-kelompok masyarakat atas tatanan sosial-politik yang ada, dan ini semakin diperkuat oleh patriarki yang sudah berakar pada masyarakat kita, dan lebih khususnya kalangan perempuan yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Masalahnya sistem yang berjalan begitu kokoh dan memiliki akar yang dalam sehingga segala sesuatunya beroperasi dengan halus dan tidak begitu kelihatan, dan bahkan membuatnya tampak begitu alamiah, *given* atau *taken for granted*.

Untuk lebih memudahkan pemaparan dan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam beberapa sub-bagian sebagai berikut (1) '*civil society*' dalam lintasan sejarah; (2) '*civil society*' dan hegemoni; (3) patriarki dan hegemoni di Indonesia; dan (4) penutup.

KONSEP '*CIVIL SOCIETY*' DALAM LINTASAN SEJARAH

Sebagai sebuah konsep, harus diakui bahwa *civil society* memiliki akar dari proses sejarah Barat. Istilah ini sendiri telah beredar dalam pembicaraan tentang filsafat sosial pada abad ke-18 di Eropa Barat dan masih berlanjut hingga akhir abad ke-19. Untuk waktu yang lama istilah tersebut sempat tenggelam hingga tahun 1990-an muncul kembali dan menjadi bahan perdebatan lagi di Eropa Barat.

Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, istilah *civil society* pada dasarnya merujuk kepada negara (*state*), yaitu sebagai suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Namun pada paruh abad ke-18, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat era Pencerahan (*Enlightenment*) dan modernisasi, negara dan *civil society* merupakan dua entitas yang berbeda. Adam Ferguson dan Tom Paine adalah sedikit filsuf Pencerahan saat itu yang ada dibalik ide pemisahan tersebut. Bahkan dalam perkembangannya kemudian, pemisahan ini berlanjut menjadi berhadapan-hadapannya *civil society* dengan aspek kemandiriannya versus kekuasaan negara.³

Pada titik ini, ada baiknya dikutip apa yang

menjadi pemikiran Hegel dan Marx mengenai *civil society*, karena, dari dua tradisi pemikir besar ini kemudian Antonio Gramsci mengadopsi dan mengembangkan gagasan pemikirannya sendiri mengenai *civil society*. Hegel bisa dibilang filsuf Jerman yang mulai melakukan pembedaan antara negara dan *civil society*. Menurutnya, *civil society* adalah wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ia adalah *buergerliche Gesellschaft* atau masyarakat borjuis yang berada di antara keluarga dan negara yang tersusun dari unsur-unsur keluarga, korporasi/asosiasi, dan aparat administrasi/legal. Ia adalah salah satu bagian saja dari tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan. Sementara itu tatanan politik yang lain adalah negara (*state*) atau masyarakat politik (*political society*).

Sebagai pemikir yang mengagungkan peran dan posisi negara, Hegel melihat *civil society* sebagai *pra-political society* atau *pra-political terrain*, sehingga seluruh kegiatan politik hanya mungkin berjalan di dalam *domain* negara. *Civil society*, masih menurutnya, adalah kekuasaan yang penuh kerisauan, kesengsaraan, dan korupsi baik secara etis maupun fisik.⁴ Ia adalah arena di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu dan kepentingan-kepentingan individu saling berbeda, dan bahkan berbenturan. Dikatakan dengan cara lain, ia pada dasarnya adalah sebuah medan laga yang tidak pernah sepi dari perbedaan kepentingan. Ini menimbulkan perpecahan-perpecahan sehingga memiliki potensi besar untuk menghancurkan dirinya sendiri (*a self-cripping entity*). Karenanya, kembali merujuk Hegel, *civil society* harus

diatur dan didominasi oleh kapasitas intelektual superior dari negara, yang merupakan bentuk tertib moral dan etika manusia yang paling tinggi.⁵

Marx dan Engles, masih tetap mempertahankan istilah *civil society*, sebagaimana dinyatakan oleh Hegel, sebagai *buergerliche Gesellschaft* atau masyarakat borjuis. Tapi dalam penjelasannya kemudian ada pemahaman yang sangat berbeda, bahkan berlawanan sama sekali. Mereka melihat negara sebagai tertib politik justru merupakan elemen subordinat (suprastruktur), dan sebaliknya, *civil society* yang direduksi sebagai wilayah hubungan-hubungan ekonomi atau hubungan produksi kapitalis adalah elemen yang desesif (struktur atau basis). *Civil society* adalah kelas borjuis itu sendiri. Yang terjadi adalah *civil society* mendominasi negara atau struktur (basis) menentukan suprastruktur. Dengan lebih tegas dikatakan bahwa *civil society* yang mendefinisikan negara dan mengelola organisasi dan tujuan-tujuan negara yang dikaitkan dengan hubungan produksi material dalam tahap tertentu dari perkembangan kapitalisme.⁶

CIVIL SOCIETY DAN HEGEMONI

Nama Antonio Gramsci selama ini sering banyak disebut sebagai aktivis politik dan filsuf besar beraliran Marxian terbesar setelah Karl Marx. Memang benar banyak pemikirannya yang diinspirasi ide-ide Marx, tapi ia melakukannya dengan berbagai penafsiran fundamental atas ajaran-ajaran dasar Marx. Salah satu ciri utama dari pemikirannya adalah posisinya yang berhadapan dengan tradisi marxian yang ortodoks. Menurut tradisi marxian

yang ortodoks, kondisi-kondisi material obyektif (basis atau struktur) mendapat tempat yang sentral dalam arti menentukan suprastruktur (ideologi, budaya, agama, negara, dan lainnya), dan ini artinya kesadaran pun dilihat hanya sebagai refleksi dari proses ekonomi-sosial (basis). Sebaliknya Gramsci justru melihat bahwa faktor kesadaran (suprastruktur) mendapat tempat dan peranan yang sangat penting dalam proses-proses perubahan sosial-politik yang terjadi.⁷

Sementara itu pembicaraan mengenai *civil society*, bagi Gramsci, adalah faktor kunci dalam memahami perkembangan kapitalisme. Berbeda dengan Marx yang meletakkan *civil society* hanya semata-mata sebagai struktur hubungan produksi (ekonomi), maka Gramsci kelihatannya meyakini bahwa *civil society* sebagai suprastruktur yang mewakili faktor aktif dan positif perkembangan sejarah yang merupakan hubungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual dan spiritual serta ekspresi politik, bersama-sama dengan *political society* (negara).⁸ Dengan demikian, berbeda dengan Marx, Gramsci membagi tiga jenis hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis, yakni, (1) ekonomi; (2) *civil society*; dan (3) *political society*. Tapi satu hal yang harus ditegaskan di sini bahwa Gramsci sendiri tetap mempertahankan pembagian dunia sosial-politik menjadi dua, yakni basis ekonomi (struktur) dan ideologi-politik (suprastruktur). Tapi, berbeda dengan Marx, Gramsci tidak melihat hubungan keduanya tersebut sebagai linier, kausal, atau mekanis. Baginya, suprastruktur tidak semata-mata hanya refleksi dari struktur. Ia justru menegaskan bahwa suprastruktur adalah sebuah realitas, obyektif, dan operatif⁹. Ringkasnya, bagi Gramsci, di satu

sisi, elemen ekonomi dapat dijalankan dalam beberapa penentuan dan cara khusus untuk mempengaruhi *civil society* dan *political society*, tapi di sisi yang lain, ekonomi dapat juga ditentukan oleh permainan yang lahir dari tingkatan otonomi relatif *civil society* dan *political society*. Dalam garis yang lebih moderat kita mungkin bisa mengatakan bahwa perbedaan antara Marx dan Gramsci hanyalah dalam masalah kadar, dan bukan substansi yaitu Marx lebih banyak memberikan tekanan pada ekonomi, sementara Gramsci lebih menaruh perhatian pada soal politik.

Dalam konsepsi Gramsci, ekonomi di sini merujuk kepada mode produksi (*mode of production*) yang paling dominan dalam masyarakat (baca: kapitalis), dan ini meliputi teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas sosial (kelas buruh dengan kelas pemilik modal) dalam arti kepemilikan alat-alat produksi. Adapun pemahaman *civil society* di sini mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut sebagai 'swasta' (*private*) seperti universitas, LSM, media massa, gereja, sekolah, serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat negara. Namun mengingat aparatus-aparatus tersebut memiliki posisi dan peran yang sangat menentukan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok-kelompok yang berkuasa dalam mempertahankan atau melanggengkan kontrol sosial-politik atas kelompok-kelompok masyarakat lainnya sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengontrol aparatus-aparatus tadi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *political society* adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan 'perintah' atau hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara bersama-sama dengan semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan lain sebagainya. Namun, masih menurut Gramsci, baik di tingkat analisis maupun empiris, ketiga hubungan sosial ini bisa saling tumpang tindih atau melengkapi. Terhadap konsep *civil society* dan *political society*, Gramsci menganggap bahwa dua struktur utama di tingkat suprastruktur tersebut merepresentasikan dua wilayah yang berbeda tapi berkaitan, yakni wilayah adanya kekuatan (*force*) dalam *political society* dan wilayah adanya persetujuan (*consent*) dalam *civil society*. Jika yang duluan merujuk kepada keunggulan sebuah kelompok sosial melalui cara dominasi alias pemaksaan kehendak, maka yang belakangan dibangun melalui apa yang disebut sebagai 'kepemimpinan intelektual dan moral'. Bentuk terakhir ini yang oleh Gramsci kemudian disebut sebagai hegemoni. Kedua struktur utama tersebut, dalam konsepsi Gramsci mengenai negara yang lebih luas (disebut sebagai negara integral) merupakan gabungan dari *civil society* dan *political society*, atau sebagai hegemoni yang dilindungi oleh tameng koersif.

Sementara itu, hegemoni di sini diartikan sebagai dominasi satu kelompok atau kelas dalam masyarakat yang dicapai tidak melalui kekuatan (*force*) tapi melalui konsensus (*consent*) dengan kelompok atau kelas yang lain. Secara lebih jelas, mengutip

laki dalam terus memelihara hubungan patriarki. Di ranah tersebut, tubuh perempuan sebagai istri atau ibu adalah milik sepenuhnya laki-laki yang berperan sebagai suami atau ayah. Sementara itu, di ranah publik, sebagian besar masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, masih belum melihat atau mengakui bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan sendiri. Ini sangat terlihat bagaimana pelecehan hingga kekerasan seksual terhadap perempuan masih terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam banyak laporan penelitian, kualitas dan kuantitasnya meningkat. Ironisnya lagi, dalam banyak hal, perempuan yang menjadi korban hampir selalu dipersalahkan karena berbagai alasan seperti pakaian yang merangsang, tingkahnya yang genit, jalan sendirian, dan masih banyak lagi; (b) beban ganda perempuan, dan bahkan multi beban karena meskipun perempuan aktif mencari nafkah di ranah publik, tetap saja mereka dibebani tanggung jawab di ranah privat karena memang diyakini itu sudah kodratnya tanpa adanya kompromi atau kesepakatan baru bahwa tanggung jawab rumah tangga ada pada suami dan istri secara bersama; (c) marjinalisasi dalam arti tidak ada atau kurangnya pengakuan akan kerja-kerja yang dilakukan perempuan sebagai kerja-kerja produktif; (d) subordinasi perempuan dalam kaitannya dengan setiap keputusan yang krusial lebih didominasi oleh laki-laki; dan (e) stereotipe terhadap perempuan. Maksudnya adalah sebuah kenyataan bahwa perempuan mengalami pembatasan-pembatasan akibat adanya pemberian label yang lebih memojokkan kaum perempuan. Sebut saja misalnya, perempuan tidak pantas menjadi pimpinan karena labelnya yang cocok sebagai ibu rumah tangga.

Mereka pun tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya menikah dan menjadi ibu pengasuh anak-anaknya, atau mereka dilihat sebagai sosok yang lemah, emosional, dan lembut sehingga lebih pantas untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan otak dan tenaga yang terlalu banyak.

Media massa dan lembaga pendidikan dan budaya seperti sekolah dan organisasi komunitas, yang merupakan elemen dari *civil society*, pada umumnya ikut mensosialisasikan dan melestarikan pembagian jender seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana perempuan ditampilkan dalam media yang secara umum semakin memperkuat peran dan posisi jender mereka. Demikian juga dengan sekolah, atau bahkan lembaga keagamaan pun sampai derajat tertentu ikut berperan di dalamnya. Sementara itu, *political society* (negara), kembali dalam kasus Orde Baru khususnya, bisa dibilang sebagai negara patriarkal yakni negara yang mempromosikan dan memelihara praktik-praktik yang secara sistematis memojokkan dan bahkan menindas perempuan. Ini bisa dilihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta berbagai kebijaksanaan yang diterapkan pada kedua bidang tersebut. Negara pun melalui Departemen Dalam Negeri memperkenalkan lima tugas perempuan yang kemudian dikenal sebagai Panca Dharma Wanita yang pada dasarnya meletakkan perempuan hanya terbatas sebagai fungsi istri dan ibu saja.¹⁵ Contoh lain yang paling gamblang adalah kebijakan negara mengenai keluarga berencana.¹⁶ Dalam kasus yang belakangan ini terlihat bagaimana negara mengambil alih proses pengambil-alihan hak reproduktif perempuan yang pada intinya

meliputi penggalakan penggunaan alat kontrasepsi dan pelembagaan praktik keluarga berencana. Perempuan dijadikan target utama dari kebijakan tersebut, dan ini dalam berbagai laporan yang dikeluarkan oleh beberapa LSM menunjukkan bagaimana cara-cara dominasi dan hegemoni saling berkait untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Menggunakan istilah Sita Aripurnami, seorang aktivis perempuan, negara menggunakan kombinasi antara 'hadiah' dan 'pukulan' terhadap masyarakat, khususnya perempuan dalam ikut menyukseskan keluarga berencana.¹⁷

PENUTUP

Sejauh ini apa yang digambarkan sebagai tegaknya hegemoni dan patriarki benar-benar meminggirkan perempuan dalam posisi subordinat dan marjinal dalam segala aspek kehidupan. Dan sebagai sisi baliknya, posisi dan peran negara yang begitu kuat, khususnya pada era Orde Baru, dengan dominasinya. Pertanyaannya kemudian, masihkah ada ruang bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan perlawanan, atau minimal bisa bernegosiasi atau kompromi sehingga mereka masih bisa tampil relatif independen atau otonom dalam hal menentukan kepentingan dan cita-citanya sendiri.

Jika kita kembali pada Gramsci, secara normatif ruang-ruang tersebut sebetulnya masih ada. Istilah yang dipakai disini adalah "*counter-hegemony*" (hegemoni tandingan) yang justru dilakukan melalui saluran-saluran dalam *civil society* yang ada. Ini artinya *civil society* yang merupakan tempat bagi kelompok sosial dominan

mengatur konsesus dan hegemoni, ternyata juga sekaligus sebagai tempat bagi kelompok-kelompok sosial yang tersubordinasi, dalam hal ini perempuan, menyusun perlawanan dan membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*). Ini misalnya yang dikerjakan kalangan pers alternatif atau aktivis LSM Perempuan yang membawa ide-ide, norma-norma atau pemikiran-pemikiran yang mengkritisi atau bahkan membongkar tatanan yang sudah mapan selama ini. Memang tidak mudah, dan bahkan merupakan kerja besar karena yang dihadapi di samping tegaknya hegemoni (*civil society*) dan dominasi (*political society*), juga berkait erat kokohnya patriarki.

Perlawanan tersebut, kembali mengutip Gramsci, disebut sebagai konsep perang posisi (*the war of position*) yakni perjuangan yang lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk membongkar atau bahkan menyalahkan ideologi, norma-norma, politik dan kebudayaan dari kelompok yang berkuasa. Ini tidak dilakukan dalam arti perang secara fisik tapi sebagai sebuah proses transformasi kultural untuk menghancurkan sebuah hegemoni dan menggantikannya dengan hegemoni yang lain.¹⁸

Sekali memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Catatan sejarah sudah sering mengungkapkan berbagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas atau mendominasi, dan dalam banyak kasus mereka berhasil. Jika memang demikian, mengapa sekarang tidak?

Martin Carnoy,¹⁰ hegemoni adalah suatu proses dalam *civil society* di mana fraksi dari kelas yang dominan melakukan kontrol melalui 'kepemimpinan moral dan intelektual' (*moral and intellectual leadership*) terhadap kelas atau kelompok yang lain. Fraksi yang dominan tersebut memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap fraksi yang lain. Mereka tidak memaksakan ideologi mereka terhadap kelas atau kelompok yang lain, tapi lebih pada merepresentasikan suatu pedagogik dan proses transformatif secara politik di mana kelas atau fraksi yang dominan mengartikulasikan sebuah prinsip hegemoni yang membawa elemen bersama yang tampil dalam 'pandangan dunia' (*world view*) dan kepentingan bagi kelompok-kelompok yang lain. Ini artinya, kelas atau kelompok-kelompok yang subordinat telah menerima dan meniru ide-ide, cara berpikir dan gaya hidup kelas atau kelompok yang dominan sebagaimana layaknya milik mereka sendiri. Dengan demikian legitimasi kekuasaan kelas atau kelompok yang dominan relatif tidak ditentang karena seluruh ide, kultur, nilai, norma dan politiknya sudah diinternalisasi atau secara sukarela, bukan karena takut atau paksaan, dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kelas atau kelompok-kelompok yang subordinat.

HEGEMONI DAN PATRIARKI DI INDONESIA

Pembicaraan mengenai *civil society* di Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an, kelihatannya lebih banyak yang bersandar pada tradisi liberal (tokohnya antara lain Tocqueville) dengan semangat sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan

negara. Ini bisa dimengerti karena pada waktu kekuasaan Orde Baru, peran dan posisi negara sangat kuat dalam mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosial-politik maupun budaya-ekonomi. Karena wajar juga kalau arti dari *civil society* biasanya merujuk kepada pemberdayaan masyarakat dengan ciri utama seperti keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kesukarelaan (*voluntary*), dan kemandirian (*independent*) dalam berhadapan dengan kekuasaan negara.¹¹ Dalam praktik politiknya ini terlihat dalam aktivitas LSM, kelompok perempuan, buruh, komunitas keagamaan dan budaya, serta kelompok-kelompok marjinal atau yang sejenis dalam masyarakat.

Sementara itu jika kita menggunakan konsep Gramsci mengenai *civil society* dan hegemoni dalam kasus Indonesia, maka semangatnya di sini adalah adanya elemen ideologi kelas yang dominan terhadap kelas-kelas yang subordinat. Pada titik ini kita bisa mengaitkannya dengan konsep yang sering dipromosikan oleh kalangan feminis yakni patriarki. Sebagaimana *civil society*, istilah patriarki ini juga bukan tanpa masalah. Ada banyak pengertian yang terkandung di dalamnya, meskipun secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau 'patriarkh' (*patriarch*). Pada awalnya istilah ini dipakai untuk menyebut suatu jenis 'keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki', yaitu rumah tangga besar *patriarch* yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan atau 'hukum bapak' sebagai laki-laki penguasa itu.¹² Tapi nampaknya istilah ini kemudian mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosial menjadi lebih luas lagi, dari tingkat

masyarakat sampai ketinggian negara. Sebut saja misalnya lembaga perkawinan, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, institusi ketenagakerjaan, media massa, birokrasi negara dan lain-lain. Pada titik ini juga pengertian dari 'hukum bapak' berkembang menjadi hukum suami, hukum pimpinan atau boss di kantor, hukum pejabat birokrasi, atau singkatnya adalah 'hukum laki-laki' yang secara umum berlaku atau beroperasi pada hampir semua institusi sosial, ekonomi, hukum, politik, dan budaya.

Sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa ada keterkaitan yang erat antara *civil society* dan hegemoni di satu sisi, dengan patriarki di sisi yang lain. Minimal titik temunya ada pada penerimaan masyarakat secara umum terhadap berbagai ide, norma, ajaran, kebijakan, dan lainnya yang lahir dari kekuatan *civil society* melalui proses hegemoni, dan ini ditopang kekuasaan negara melalui dominasi, yang jatuh bersamaan dengan tegaknya patriarki dalam masyarakat yang kemudian berkembang sampai ke tingkat negara.

Untuk lebih jelasnya kita bisa mulai dari institusi sosial keluarga yang erat kaitannya dengan patriarki. Kita melihat tegak dan kuatnya hegemoni dalam hubungan patriarki yang menyosialisasikan dan melestarikan posisi dan peran istri dalam melayani suami di dalam keluarga. Wacana bahwa istri adalah orang yang mengasuh anak dan merawat suami, dan ini artinya mereka hidup di dunia privat, begitu kuat diterima oleh masyarakat pada umumnya sebagai sesuatu yang alamiah atau sudah merupakan kodrat. Demikian juga sebaliknya bahwa suami adalah pencari nafkah utama keluarga, dan ini artinya mereka beroperasi di dunia publik.

Padahal, sebagaimana sudah banyak diungkapkan, bahwa yang terjadi adalah pembagian jender tapi dipahami sebagai sesuatu yang sudah diterima apa adanya alias kodrat atau alamiah. Secara lebih jelas, adanya pembagian jender¹³ antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga seperti ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I
Pembagian Peran Jender

| Laki-laki | Perempuan |
|----------------------|-------------------------|
| Produktif | Reproduktif |
| Publik | Privat/Domestik |
| Maskulin | Feminin |
| Pencari Nafkah Utama | Pencari Nafkah Tambahan |

Sumber: Apa itu Jender? Buku Panduan untuk Para Pekerja (ILO Indonesia, 1997)

Wacana seperti ini terus menerus di(re)produksi dalam masyarakat yang pada gilirannya menjadi sebuah keyakinan jender dan kemudian akan menghasilkan ketidakadilan jender. Keyakinan jender yang dimaksudkan di sini bagaimana masyarakat secara umum pada akhirnya menerima adanya pembagian peran jender tersebut sebagai sebuah kodrat yang memang begitu adanya. Sementara itu, ketidakadilan jender adalah akibat dari pembagian peran jender yang dalam banyak hal sangat merugikan perempuan.

Sedikitnya ada lima persoalan yang muncul dari adanya ketidakadilan jender seperti ini yakni,¹⁴ (a) kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat maupun publik. Pada ranah privat yang terjadi adalah refleksi tegak dan kuatnya 'kepemimpinan moral dan intelektual' laki-

DAFTAR PUSTAKA

Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, (terjemahan). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, 1996.

Bottomore, Tom (eds.). *A Dictionary of Marxist Thought*. Harvard University Press, 1983.

Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts Institute of Technology, 1992.

Carnoy, Martin. *The State and Political Theory*. Princeton University Press, 1984.

M.D., Mukhotib (ed.). *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII dan Pact-INPI, 1998.

Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.

Sugiono, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

CATATAN BELAKANG

1. Kita bisa menyebut beberapa tokoh besar yang bicara mengenai "civil society" seperti Hegel, Cicero, John Locke, Rousseau, Hobbes, Karl Marx, Adam Ferguson, dan masih banyak lagi. Menurut catatan sejarah, Cicero (106-43 S.M.), seorang orator dan pujangga Roma terkenal adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah ini, yang merupakan terjemahan Latin dari '*civilis societas*'. Ia menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup.

2. Istilah "masyarakat madani" pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim yang saat itu Timbalan P.M. Malaysia, dalam Festival Istiqlal di Jakarta 1995. M. Dawam Rahardjo kelihatannya sepakat bahwa alih bahasa dan definisi yang pas dari "civil society" adalah "masyarakat madani". Lihat M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999), hlm. 133-173. Sebaliknya, M. AS. Hikam tetap mempertahankan istilah aslinya karena pengertian "masyarakat madani", menurutnya, memiliki arti dan konteks yang sangat berbeda dengan "civil society". Lihat Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999). Istilah yang lebih netral, meskipun juga menimbulkan masalah adalah "masyarakat warga" yang diajukan oleh Lembaga Etika Atmajaya atau "masyarakat kewargaan" yang ditawarkan oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia). Yang belakangan ini misalnya lihat M. Ryaas Rasyid, "Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan," *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17, 1997. Sementara itu, istilah "masyarakat sipil" yang antara lain digunakan oleh Dr. Mansour Fakhri, meskipun dalam arti terjemahan lebih sesuai tapi kelihatannya dalam arti makna tidak terlalu mengena karena mengimplikasikan sebagai lawan dari "masyarakat militer". Lihat Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Tulisan ini sendiri sejalan dengan AS. Hikam untuk tetap mempertahankan istilah aslinya.

3. Untuk lengkapnya lihat Jean L. Cohen dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, (Massachusetts Institute of Technology, 1992). Sementara itu, Kwi-Hee Bae dan Joon Hyoung Lim dari University of Southern California dalam salah satu kertas kerjanya, membagi menjadi tiga tradisi pemikiran dalam kaitannya dengan konsep *civil society*. Yang pertama adalah tradisi (Neo)liberal dengan tokohnya yang terkenal antara lain Tocqueville dan Putnam. Kemudian tradisi Habermasian di mana Arato dan Cohen adalah salah satu penggagas utamanya. Yang terakhir adalah tradisi Hegel-Marxis di mana Gramsci adalah salah satu pengikut garis tersebut yang menjadi kajian dari tulisan ini. Lihat Kwi-Hee Bae dan Joon Hyoung Lim, "Bringing the Civil Society Back In: The Implication of Civil Society in Democratic Governance," kertas kerja yang dipresentasikan dalam 60th ASPA National Conference, 10-14 April 1999, Orlando, Florida, Amerika Serikat.

4. Diambil dari "Gramsci and the State,"

dalam Martin Carnoy, *The State and Political Theory*. (Princeton University Press, 1984), hlm. 65-77.

5. *Ibid.*, hlm. 67.

6. *Ibid.*, hlm. 67-68; dan lihat juga Tom Bottomore, et. al. (eds.), *A Dictionary of Marxist Thought*, (Harvard University Press, 1983), hlm. 72-74.

7. Posisi Gramsci seperti ini tidak jarang yang kemudian orang mempertanyakan sejauh mana keaslian Marxisme Gramsci. Ia dalam banyak kasus dituduh memiliki pemikiran Marxis yang idealis-voluntaristik. Memang di sini pengaruh dari filsafat idealis Benetto Croce yang lebih simpatik kepada Hegel daripada Marx sangat terasa. Tapi menurut Gramsci, filsafat Croce terjebak kepada filsafat spekulatif karena ketika ia membicarakan ide-ide atau gagasan-gagasan subyektif dianggap itu sebagai produk perkembangan roh, dan bukannya produk perjuangan kehidupan nyata manusia dalam sejarah seperti yang diyakininya. Karenanya pemikiran Gramsci ini disebut sebagai 'Filsafat Praksis' (Philosophy of Praxis) yakni filsafat yang mendasarkan pada aktivitas praktis tanpa meninggalkan unsur kesadaran kritis. Lihat "Antonio Gramsci," dalam Richard Bellamy, *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*, (terjemahan), (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 179.

8. Penjelasan mengenai civil society dan political society bisa dilihat dari beberapa sumber antara lain Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999), hlm. 101-106; Carnoy, *op.cit.*, hlm. 67-68; Cohen dan Arato, *op.cit.*, hal. 142-146; dan Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 34-35. Istilah political society sendiri pada dasarnya bukan pengganti istilah negara (state), namun hanya merujuk kepada hubungan koersif atau kekuatan memaksa yang terdapat pada aparat negara.

9. *Ibid.*,

10. Carnoy, *op.cit.*, hlm. 69-70.

11. Hikam, *op.cit.*, hlm. 2-3.

12. Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, (terjemahan), (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, 1996), hlm. 1-2.

13. Ada perbedaan antara seks dan jender. Yang pertama merujuk kepada pembagian jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Tuhan atau biasa disebut juga sebagai kodrat Tuhan. Karenanya fungsinya tidak bisa diubah. Sementara yang belakangan merujuk kepada pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Karenanya

jender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan.

14. Lihat Mansour Fakhri, "Isu-isu dan Manifestasi Ketidakadilan Jender," dalam Mukhotib M.D. (ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Jender* (Yogyakarta: PMII dan Pact-INPI, 1998), hlm. 3-13.

15. Panca Dharma Wanita terdiri dari, (1) perempuan sebagai pendamping suami; (2) penghasil penerus bangsa; (3) ibu dan pendidik anak; (4) pengelola rumah tangga dan bekerja di luar rumah hanya untuk menambah penghasilan keluarga; dan (5) anggota masyarakat Indonesia.

16. Lihat misalnya Sita Aripurnami, *Hak Reproduksi antara Kontrol dan Perlawanan: Wacana tentang Kebijakan Kependudukan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Kalyanamitra, 1999).

17. *Ibid.*, hlm. 38.

18. Carnoy, *op.cit.*, hlm. 69-7; dan Sugiono, *op.cit.*, hlm. 46.